

Usulan Kebijakan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Covid-19

Advokasi Hak Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan

IDI, IBI, PATELKI, LaporanCovid-19, ICW, Lokataru Foundation, YLBHI

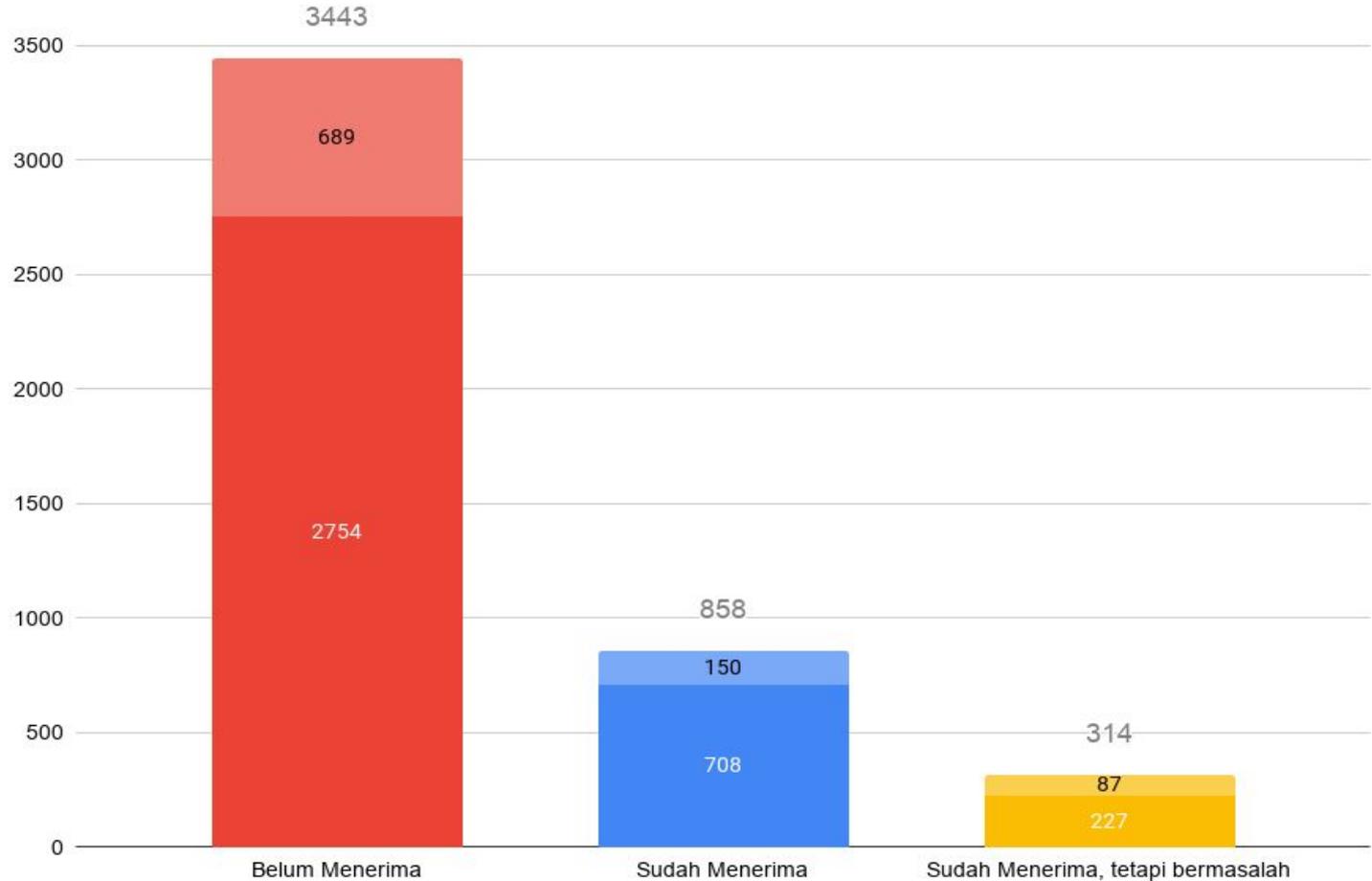
Jakarta, 22 Maret 2021

Hasil Audiensi sebelumnya dengan K/L (Data per 5 Februari 2021):

- Kementerian Kesehatan: mengintegrasikan data santunan yang dikumpulkan oleh Organisasi Profesi dan data yang diperoleh di Kementerian Kesehatan, serta menginstruksikan jajaran Kementerian Kesehatan untuk melakukan survei kepada faskes untuk mendata tenaga kesehatan yang belum mendapatkan dana insentif.
- Kantor Staf Presiden: menelusuri laporan lebih lanjut dan berkomitmen untuk mendorong secara kolaboratif untuk merealisasikan dana santunan dan insentif yang masih tersendat.
- KPK: menginvestigasi lebih lanjut mengenai pemotongan insentif oleh faskes yang mencapai 70%

Jenis Masalah Insentif

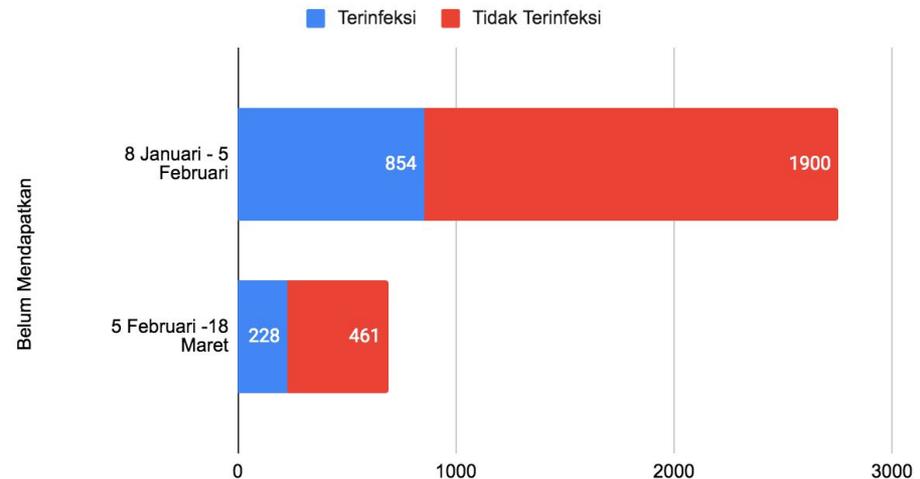
Periode 8 Jan - 5 Feb '21 dan 5 Feb - 18 Mar '21



Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19 belum mendapatkan Dana Insentif serta keadaannya

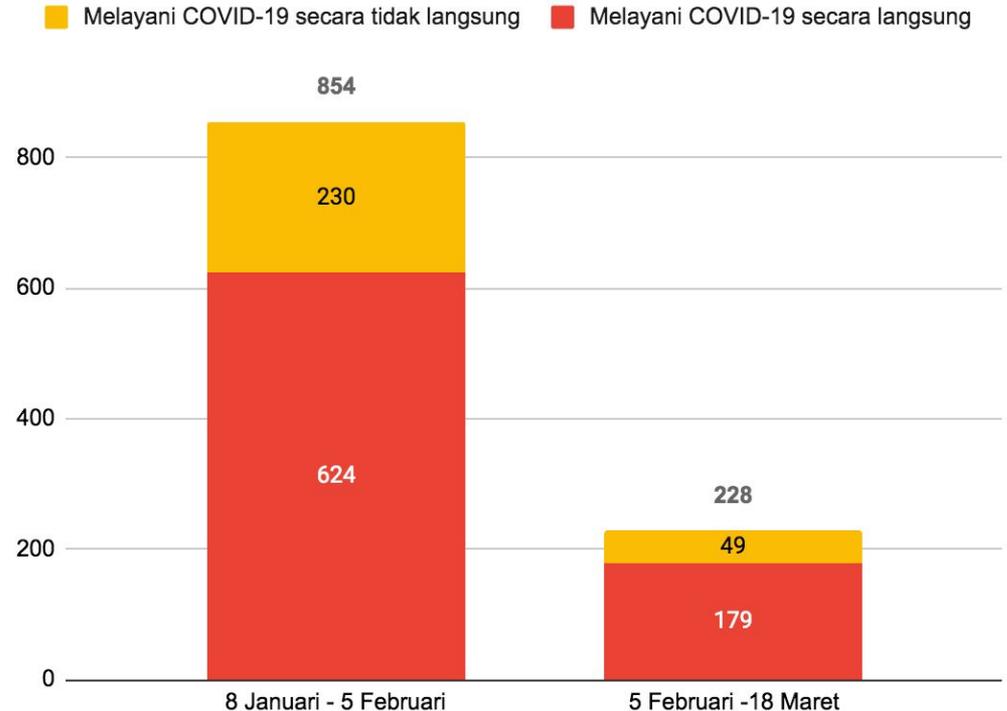
1. KMK HK.01.07/MENKES/2539/2020 hanya memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan sesuai dalam aturan *a quo*.
2. Namun, banyak tenaga kesehatan yang tidak melayani pasien Covid-19 secara langsung yang terpapar Covid-19.
3. Berdasarkan tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif (**Feb: 2.754 orang; Mar: 689 orang**), (**Feb: 854; Mar:228**) diantaranya terinfeksi Covid-19.

Keadaan nakes yang belum mendapatkan insentif



Tenaga Kesehatan Terinfeksi Covid-19 dan Belum mendapatkan dana Insentif

Dari total tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 (**Feb: 854 orang; Maret: 228**), (**Feb:230 orang; Maret:49**) tidak secara langsung menangani pasien Covid-19. Sedangkan (**Feb: 624 orang; Maret: 179**) menangani pasien Covid-19.



Santunan Kematian Belum Tersalurkan Secara Menyeluruh

1. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat (**Feb: 29 orang, Mar: 14**) yang mengisi formulir, dan menyampaikan bahwa **belum mendapatkan santunan kematian dari pemerintah**
2. Data Tim Pusara Digital Laporan Covid-19 per 20 Maret 2021, terdapat **857** tenaga kesehatan meninggal akibat Covid-19. Baru **196** Ahli Waris/Keluarga yang menerima santunan kematian.
3. Pada 8 Jan - 5 Februari: 1 ahli waris/keluarga menyampaikan sudah mendapat santunan kematian dari Organisasi Profesi (PPNI) Rp 5.000.000. 1 ahli waris/keluarga mendapat santunan sebesar Rp. 500.000 tetapi tidak diketahui sumber dananya.
4. Pada bulan 5 Feb - 18 Mar: Dari 14 laporan, hanya 1 yang mendapatkan dana santunan sebesar Rp. 300.000.000,00

Vaksin untuk Tenaga Kesehatan

Januari - Maret:

4.166 tenaga kesehatan mengisi formulir vaksin yang juga tertera di dalam formulir insentif dan santunan.

- **933 di antaranya belum mendapatkan vaksinasi.** Apabila dirincikan:
 - 132 (14,%) belum/tidak terdata oleh fasilitas kesehatan.
 - 79 (8%) kendala teknis saat pendaftaran.
 - 33 (3%) minimnya sosialisasi dan informasi ke Nakes

Vaksin untuk Tenaga Kesehatan

Februari- Maret:

926 tenaga kesehatan yang mengisi formulir. 768 diantaranya sudah mendapatkan vaksin.

- **158 lainnya belum mendapatkan vaksin**, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
 - 18 nakes tidak/ belum terdata
 - 9 nakes mengalami kendala saat proses pendaftaran
 - 6 nakes masih dalam proses pendaftaran
 - 3 nakes tidak mendapatkan vaksin karena stok habis.

Nakes yang belum mendapatkan vaksin

Belum terdaftar:

“Saya sudah mendaftarkan [diri] ke website peduli lindungi. Pada bulan november saya masih terdaftar mendapatkan vaksin. Namun menjelang bulan Januari saya mengecek kembali di website tersebut, dan tertulis saya tidak terdaftar mendapatkan vaksin. Lalu saya coba menelpon 119 dan kembali mendapatkan jawaban bahwa saya tidak terdaftar mendapatkan vaksin” (31 Januari 2021)

“Saya sudah cek lewat Whatsapp tapi belum terdaftar [sebagai penerima vaksin]” (03 Februari 2021)

“NIK belum terdaftar” (13 Maret 2021)

Kendala teknis registrasi:

“Dari data NIK saya sudah terdaftar sebagai penerima vaksin hanya saja sampai sekarang tidak ada sms notifikasi dan langkah yang harus saya jalani selanjutnya” (3 Februari 2021)

“Sudah mendaftar lewat whatsapp kemenkes tetapi di cek di website belum ada nama saya terdaftar” (6 Februari 2021)

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

1. Ketiadaan data yang detail dan terbuka mengenai laporan pertanggungjawaban penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan berpotensi:
 - a. Kekeliruan/perbedaan data dalam menyampaikan informasi kepada publik.
 - b. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam menyusun suatu rumusan atau dalam tahap pelaksanaan.
 - c. Membuka celah terjadinya potensi korupsi, terutama dalam aspek penghitungan dan penyaluran insentif, terlebih anggaran yang dikelola cukup besar.

Usulan Kebijakan

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memastikan distribusi insentif dan santunan kepada tenaga kesehatan dilakukan secara:

- a. Terbuka;**
- b. Tepat waktu;**
- c. Tepat jumlah; dan**
- d. Bertanggung jawab dan adil;**